



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
TAHUN 2023



Jayapura, 2023



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Jalan Tanjung Ria Base G Jayapura 99117 Telp. 541043, 541060, 541042
FAX. (0967) 541088, 541842, e-Mail : disdik@papua.go.id, website : disdik.papua.go.id
JAYAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR : 188.4/377.13.DPPAD/V/2023

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
PROVINSI PAPUA TAHUN 2023

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah dan PERMENPAN NO. PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengukuran Kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Tahun 2010-2025;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/11/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
2. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
3. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi : (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
4. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;
5. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD;
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut;
8. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan;
9. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan;

10. Indikator Kinerja Utama (*key performance indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja, diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- (1). Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua sekurang-kurangnya adalah indikator Keluaran sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
- (2). Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua 2018-2023.

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja yaitu :

- a. Spesifik;
- b. Dapat dicapai;

- c. Relevan;
- d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. Dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pasal 6

Pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

BAB IV

PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 7

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua digunakan untuk :

- a. Perencanaan tahunan;
- b. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- c. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- d. Evaluasi kinerja; dan
- e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan pada Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 8

Pembinaan atas pelaksanaan penetapan Indikator Kinerja Utama dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Dengan adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua tentang Indikator Kinerja Utama ini, maka setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua wajib menggunakan indikator kinerja dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 2 Mei 2023



KEPALA DINAS

LUKAS CHRISTIAN SOHLAIT, ST., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690414 199003 1 007

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR : 188.4/377.13.DPPAD/V/2023

Tanggal : 2 Mei 2023

Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- 1. Instansi : Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua
- 2. Tugas : Menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur
- 3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - d. Pelaksanaan Ketatausahaan Dinas.
- 4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatkan aksesibilitas dan mutu penyelenggaraan layanan pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (IKU Provinsi)	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n xi$ <p> RLS : Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 18 tahun keatas n : Jumlah penduduk usia 18 tahun keatas xi : Lama sekolah penduduk ke-I yang berusia 18 tahun keatas </p>	Sekretaris dan Sub Bagian Program	Badan Pusat Statistik Papua dan Dinas PPAD Provinsi Papua
		Harapan Lama Sekolah (IKU Provinsi)	$HLS \sum_a^t = \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	Sekretaris dan Sub Bagian Program	Badan Pusat Statistik Papua dan Dinas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
			HLS : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P : Jumlah penduduk usia i pada tahun t i : Usia xi : Lama sekolah penduduk ke-l yang berusia 18 tahun keatas		PPAD Provinsi Papua
		Angka Melek Huruf (IKU Provinsi)	$\left(\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 th ke atas bisa baca tulis}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 15}} \right) \times 100\%$	Sekretaris dan Sub Bagian Program	Badan Pusat Statistik Papua dan Dinas PPAD Provinsi Papua
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	$\left(\frac{\text{Jumlah Siswa PAUD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 3-6}} \right) \times 100\%$	Bidang PKLK dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	$\left(\frac{\text{Jumlah Siswa SD/MI}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12}} \right) \times 100\%$	Bidang PKLK dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	$\left(\frac{\text{Jumlah Siswa SD/MI Usia 7-12}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12}} \right) \times 100\%$	Bidang PKLK dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	$\left(\frac{\text{Jumlah Siswa SMP/MTs}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15}} \right) \times 100\%$	Bidang PKLK dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	$\left(\frac{\text{Jumlah Siswa SMP/MTs Usia 13-15}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15}} \right) \times 100\%$	Bidang PKLK dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
		Angka Putus Sekolah 7-12 thn	$\left(\frac{\text{Jumlah Siswa Putus Sekolah SD}}{\text{Jumlah Siswa baru SD}} \right) \times 100\%$	Bidang PKLK dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Angka Putus Sekolah 13-15 thn	$\left(\frac{\text{Jumlah Siswa Putus Sekolah SMP/MTs}}{\text{Jumlah Siswa baru SMP/MTs}} \right) \times 100\%$	Bidang PKLK dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	$\left(\frac{\text{Jumlah Siswa SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16-18}} \right) \times 100\%$	Bidang PSMA, Bidang PSMK dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	$\left(\frac{\text{Jumlah Siswa SMA/SMK/MA Usia 16-18}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16-18}} \right) \times 100\%$	Bidang PSMA, Bidang PSMK dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
		Angka Putus Sekolah 16-18 thn	$\left(\frac{\text{Jumlah Siswa Putus Sekolah SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah Siswa baru SMA/SMK/MA}} \right) \times 100\%$	Bidang PSMA, Bidang PSMK dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
2.	Meningkatnya kompetensi siswa pada semua jenjang Pendidikan	Presentase Angka Kelulusan SD/MI	$\left(\frac{\text{Jumlah Lulusan SD}}{\text{Jumlah Siswa tingkat tertinggi jenjang SD}} \right) \times 100\%$	Bidang PKLK dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
		Presentase Angka Kelulusan SMP/MTs	$\left(\frac{\text{Jumlah Lulusan SMP/MTs}}{\text{Jumlah Siswa tingkat tertinggi jenjang SMP/MTs}} \right) \times 100\%$	Bidang PKLK dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
		Presentase Angka Kelulusan SMA/MA	$\left(\frac{\text{Jumlah Lulusan SMA/MA}}{\text{Jumlah Siswa tingkat tertinggi jenjang SMA/MA}} \right) \times 100\%$	Bidang PSMA dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
		Presentase Angka Kelulusan SMK	$\left(\frac{\text{Jumlah Lulusan SMK}}{\text{Jumlah Siswa tingkat tertinggi jenjang SMK}} \right) \times 100\%$	Bidang PSMK dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
3.	Meningkatnya kompetensi guru pada semua jenjang Pendidikan	Presentase Guru SD Yang telah Bersertifikasi	$\left(\frac{\text{Jumlah Guru SD yang bersertifikasi Nasional}}{\text{Jumlah Seluruh Guru SD}} \right) \times 100\%$	Bidang Ketenagaan dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
		Presentase Guru SMP Yang telah Bersertifikasi	$\left(\frac{\text{Jumlah Guru SMP yang bersertifikasi Nasional}}{\text{Jumlah Seluruh Guru SMP}} \right) \times 100\%$	Bidang Ketenagaan dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
		Presentase Guru SMA Yang telah Bersertifikasi	$\left(\frac{\text{Jumlah Guru SMA yang bersertifikasi Nasional}}{\text{Jumlah Seluruh Guru SMA}} \right) \times 100\%$	Bidang Ketenagaan dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
		Presentase Guru SMK Yang telah Bersertifikasi	$\left(\frac{\text{Jumlah Guru SMK yang bersertifikasi Nasional}}{\text{Jumlah Seluruh Guru SMK}} \right) \times 100\%$	Bidang Ketenagaan dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
		Presentase Guru PLB Yang telah Bersertifikasi	$\left(\frac{\text{Jumlah Guru PLB yang bersertifikasi Nasional}}{\text{Jumlah Seluruh Guru PLB}} \right) \times 100\%$	Bidang Ketenagaan dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
		Presentase Guru SD Yang Berkualifikasi S1	$\left(\frac{\text{Jumlah Guru SD yang berkualifikasi S1}}{\text{Jumlah Seluruh Guru SD}} \right) \times 100\%$	Bidang Ketenagaan dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
		Presentase Guru SMP Yang Berkualifikasi S1	$\left(\frac{\text{Jumlah Guru SMP yang berkualifikasi S1}}{\text{Jumlah Seluruh Guru SMP}} \right) \times 100\%$	Bidang Ketenagaan dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
		Presentase Guru SMA Yang Berkualifikasi S2	$\left(\frac{\text{Jumlah Guru SMA yang berkualifikasi S2}}{\text{Jumlah Seluruh Guru SMA}} \right) \times 100\%$	Bidang Ketenagaan dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Presentase Guru SMK Yang Berkualifikasi S2	$\left(\frac{\text{Jumlah Guru SMK yang berkualifikasi S2}}{\text{Jumlah Seluruh Guru SMK}}\right) \times 100\%$	Bidang Ketenagaan dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
		Presentase Guru PLB Yang Berkualifikasi S2	$\left(\frac{\text{Jumlah Guru PLB yang berkualifikasi S2}}{\text{Jumlah Seluruh Guru PLB}}\right) \times 100\%$	Bidang Ketenagaan dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
4.	Meningkatnya standar mutu sekolah dan program keahlian/studi SMK serta lembaga kursus	Presentase Sekolah Menengah Atas Yang Terakreditasi	$\left(\frac{\text{Jumlah SMA yang sudah berakreditasi}}{\text{Jumlah Seluruh SMA}}\right) \times 100\%$	Bidang PSMA dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
		Presentase Sekolah, Program Keahlian Yang Terakreditasi	$\left(\frac{\text{Jumlah SMK yang sudah berakreditasi}}{\text{Jumlah Seluruh SMK}}\right) \times 100\%$	Bidang PSMK dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
		Presentase Sekolah Pendidikan Luar Biasa Yang Terakreditasi	$\left(\frac{\text{Jumlah PLB yang sudah berakreditasi}}{\text{Jumlah Seluruh PLB}}\right) \times 100\%$	Bidang PKLK dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
5.	Meningkatnya budaya baca pada masyarakat	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki perpustakaan yang berkualitas	$\left(\frac{\text{Jumlah Kab./Kota yang memiliki perpustakaan berkualitas}}{\text{Jumlah Kab./Kota se-Papua}}\right) \times 100\%$	Bidang Perpustakaan dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
		Persentase tingkat pemanfaatan layanan perpustakaan oleh masyarakat	$\left(\frac{\text{Jumlah kunjungan di Perpustakaan}}{\text{Jumlah penduduk}}\right) \times 100\%$	Bidang Perpustakaan dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
		Persentase lokus pembudayaan gemar membaca	$\left(\frac{\text{Jumlah lokus gemar membaca}}{\text{Jumlah penduduk}}\right) \times 100\%$	Bidang Perpustakaan dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
6.	Meningkatnya kualitas pengolahan kearsipan OPD	Persentase arsip dinamis yang telah dibuat daftar arsip	$\left(\frac{\text{Jumlah arsip dinamis yang telah dibuat arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip dinamis}}\right) \times 100\%$	Bidang Kearsipan dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
		Persentase arsip statis yang telah dibuat daftar arsip	$\left(\frac{\text{Jumlah arsip statis yang telah dibuat arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip statis}}\right) \times 100\%$	Bidang Kearsipan dan Sub Bagian Program	Dinas PPAD Provinsi Papua
7.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PPAD Provinsi Papua	Hasil Evaluasi SAKIP	Predikat dan Nilai SAKIP Dinas PPAD Provinsi Papua	Kepala Dinas PPAD Provinsi Papua	Inspektorat Papua

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 2 Mei 2023

KEPALA DINAS



LUKAS CHRISTIAN SOHILAIT, ST., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19690414 199003 1 007